

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan makin marak terjadi saat ini. Banyak berita yang memuat tentang perempuan dan menyudutkan. Ini merupakan bentuk dari bias gender yang dialami perempuan. Perempuan sering digambarkan sebagai sosok ibu rumah tangga di mana profesi tersebut dianggap bukan sebagai sebuah pekerjaan, pengasuh, lemah, tidak mampu membuat keputusan tanpa bantuan dari laki-laki. Perempuan selalu melihat dirinya sebagai obyek seksual/symbol seks (*pornographizing; exploitation*), obyek *fetish*, obyek peneguhan pola kerja patriarki, obyek pelecehan dan kekerasan, selalu disalahkan (*blaming the victim*) dan bersikap pasif, serta menjalankan fungsi sebagai pengonsumsi barang atau jasa dan sebagai alat pembujuk (Sunarto, 2009: 4).

Menurut Fly (dalam Sunarto, 2009: 4), kaum perempuan telah mengalami kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh suatu jaringan kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh suatu jaringan kekuasaan dalam berbagai bentuk, misalnya berupa diskriminasi kerja, diskriminasi upah, pelecehan seksual, ketergantungan pada suami, pembatasan peran sosial sebagai perempuan, istri dan ibu rumah tangga, dan sebagainya. Dua cara perempuan mengalami diskriminasi, cara

perempuan diajarkan untuk menggunakan bahasa dan cara-cara di mana bahasa digunakan untuk menggambarkan perempuan (Krolokke, 2009: 64).

Kasus kekerasan sangat marak terjadi dan hal sudah berlangsung lama di seluruh dunia. Seperti yang dimuat di *Tempo.co* data Komnas Perempuan pada 2014 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 293.220 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 279.688 kasus. Kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di Aceh sejak dulu bahkan sampai saat ini. Padahal saat ini Aceh telah menerapkan peraturan daerah yang disebut dengan Qanun Syariah Islam.

Tabel. 1

Tindak Kekerasan Terkait Penegakan Syariah (Periode Januari – Oktober 2011)

No	Bulan	Juml kasus	Lokasi	Bentuk pelanggaran yang dilakukan	Bentuk kekerasan
1.	Jan	6	2 kasus di Lhokseumawe, 2 kasus di Nagan Raya, 1 Kasus di Aceh Besar, dan 1 kasus di Aceh Utara 1 Kasus.	Pelanggaran qanun Khalwat(mesum)	Pemukulan dan memandikan dengan air comberan
2.	Feb	3	2 di Kota Langsa dan 1 di Aceh timur	Pelanggaran qanun Khalwat(mesum)	Pemukulan dan di mandikan
3.	Mar	8	1 di Aceh Besar, 1 di kota Banda Aceh, 1 di pidie, 3 di Aceh utara, dan 2 kasus di Bireun.	Pelanggaran qanun Khalwat(mesum)	Pemukulan, di mandikan dan direndam dengan air parit
4.	Apr	7	1 kasus di Pidie, 1 kasus di Bireun, 1 kasus di Lhokseumawe, 1 Nagan Raya, 1 Kasus di Aceh Barat, 1 kasus mengarak pelaku yang dilakukan oleh	Pelanggaran qanun Khalwat(mesum)dan Judi	Pemukulan, memnadikan dengan air comberan, dan mengarak

			kepolisian di Tamiang;		
5.	Mei	3	1 kasus di Aceh Utara, 2 kasus di Aceh Barat.	Pelanggaran qanun Khalwat(mesum)	Pemukulan dan di mandikan
6.	Juni	4	1 kasus di Aceh besar, 2 kasus di Bireun, dan 1 kasus di Aceh Utara	Pelanggaran qanun Khalwat(mesum), perkawinan Ilegal	Pemukulan, memandikan dengan air parit, serta memandikan di irigasi, menikahkan.
7.	Juli	3	1 kasus di Aceh Tamiang, 1 kasus di Aceh Utara, dan 1 kasus di Bireun.	Pelanggaran qanun Khalwat(mesum)	Pemukulan, memandikan dengan air comberan, dan dinikahkan
8.	Agu	2	1 kasus di Aceh Besar dan satu kasus di Lhokseumawe	Pelanggaran qanun Khalwat(mesum)	Memukul dan memandikan dengan air comberan.
9.	Sept	1	1 di Aceh Barat, 1 kasus di Kota Langsa, 1 kasus di Kota Lhokseumawe, 1 kasus di Aceh Besar, dan 1 kasus lagi di Kota Banda Aceh. Kendaraan	Merupakan pelanggaran Qanun mesum (<i>khalwat</i>) .	Pemukulan, memandikan, direndam ke dalam tambak, serta perusakan kendaraan.
10.	Okt	2	1 kasus di Aceh tenggara, 1 kasus di Langsa	Merupakan pelanggaran Qanun mesum (<i>khalwat</i>).	Pemukulan dan di mandikan dengan air kuburan

Sumber: Monitoring dan Advokasi Kekerasan di Aceh. Kontras Aceh

Qanun Syariat Islam ini mengikat seluruh lapisan masyarakat di Aceh agar bertindak sesuai dengan aturan agama Islam. Syariat Islam adalah norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku individual maupun tingkah laku kolektif. Akhir-akhir ini muncul gagasan agar dilakukannya pembaharuan tentang Qanun Syariat Islam terkait penerapan hukuman cambuk yang tertera dalam Qanun tahun 2003 nomor 12 (tentang *khamar*/minuman keras dan sejenisnya), nomor 13 (tentang *maisir*/perjudian) dan nomor 14 (tentang *khalwat*/mesum). Meskipun sudah adanya Qanun yang mengatur tentang hal tersebut, tetapi masih banyak juga pelanggaran yang terjadi.

Dalam Qanun Syariat Islam telah dijelaskan hukuman seperti apa yang akan didapatkan jika melanggar peraturan. Qanun No. 11 tahun 2002, di Bab 1 Ketentuan Umum, Syi'ar Islam yaitu “semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam.” Syariat Islam itu sendiri dijabarkan sebagai “tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.” Tetapi banyak pelanggaran atau penyelewengan yang terjadi atas ketidakjelasan aturan pelaksanaan dan implementasinya. Banyaknya masyarakat yang main hakim sendiri.

Sehingga pembaharuan tentang Qanun sangat diharapkan dan disarankan, bukan karena persoalan yang ditimbulkan oleh substansi tujuan penerapan Qanun, melainkan aplikasi dan pelaksanaannya. Yang jelas terlihat adalah adanya praktek main hukum sendiri (kekerasan berbasis komunitas), diskriminasi dan stigma bagi tersangka, terlebih bagi perempuan. Dalam radikal feminisme wacana "patriarki", suatu sistem sosial di mana semua laki-laki diasumsikan mendominasi dan menindas semua perempuan, bertanggung jawab atas posisi perempuan dalam masyarakat (Van Zoonen, 2012: 28).

Dalam wacana patriarki, laki-laki mengontrol perempuan. Laki-laki menguasai sektor publik yang menunjukkan superioritas. Sedangkan perempuan di sektor domestik yang menunjukkan inferioritas. Adanya dominasi laki-laki sehingga perempuan tetap disudutkan dalam berbagai kasus, padahal jika dikaji ulang Qanun-qanun Syariat Islam yang ada tidak hanya mengatur tentang perempuan tetapi seluruh

masyarakat Aceh. Tidak sedikit pelanggaran Qanun yang terjadi di Aceh. Pelanggaran ini tidak hanya dilakukan oleh perempuan. Para laki-laki pun melakukannya. Namun yang banyak ditonjolkan adalah kesalahan perempuan. Terlebih lagi berita-berita yang ada atau dipublis ke media. Telihat sangat jelas bahwa perempuan yang menjadi penyebab atau disudutkan.

Padahal dalam Undang-undang Pers No. 40 tahun 1999, pada pasal 6 poin B yang berisi “Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai: penegak nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supermasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati Kebhinekaan”. Dalam Kode Etik Jurnalistik juga telah diatur bahwa pemberitaan haruslah berimbang, tidak memihak dan menyudutkan. Namun pada kenyataannya banyak ditemui berita-berita yang memihak terhadap laki-laki dan menyudutkan perempuan.

Pemberitaan kekerasan terhadap perempuan di Aceh banyak dianggap karena adanya Syariat Islam. Sehingga banyak media yang menyalahkan keberadaan Syariat Islam. Sepanjang Februari 2012, *Sharia News Watch* memantau pemberitaan tentang syariat Islam pada 18 media baik cetak dan *online* di Aceh dan nasional. Media cetak yang dipantau itu adalah *Serambi Indonesia*, *Harian Aceh*, *Rakyat Aceh*, *Metro Aceh*, *Prohaba*, *Tabloid Modus*, *Waspada*, *Analisa*, *Kompas*, *Republika*, *Media Indonesia*, *The Jakarta Post* dan *Koran Tempo*. Sedangkan, media *online* yaitu *acehkita.com*, *acehcorner.com*, *atjehpost.com*, *theglobejournal.com*, dan *thejakartaglobe.com*. Selama Februari, terdapat 70 berita terkait syariat Islam menghiasi wajah media.

Berita terkait penangkapan warga yang diduga melanggar syariat jadi isu terbanyak diproduksi media.

Tabel. 2
Isu Pemberitaan Syariat Islam di Media

Isu	Cambuk	Razia	Sosialisasi	Pernyataan	Pelaksanaan Eksekusi	Pelaksanaan Prostitusia	Penangkapan	Jumlah
Serambi Indonesia		2	1			2		5
Harian Aceh		1						1
Pro Haba						2	10	12
Rakyat Aceh		1	8	7				16
Metro Aceh		4		1	1		8	14
Modus								-
Waspada			1	8				9
Analisa			3	1				4
Kompas								-
Republika								-
Media Indonesia								-
Tempo								-
The Jakarta Post							1	1
The Jakarta Globe.Com			1	2				3
The Atjeh Post.com							1	1
The Globe Journal.Com		1		1				2
Aceh Corner.Com			1					1
Acehkita.Com			2					2
Jumlah	-	9	17	20	1	4	20	71

Sumber: Sharia News Watch, 2012.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Aji Banda Aceh ini dapat dilihat bahwa berita-berita terkait penegakan syariat Islam yang dimuat media masih jauh dari apa

yang diharapkan. Satu fungsi media sebagai alat kontrol sosial dalam pelaksanaan syariat Islam dapat dikatakan masih lemah. Media dalam pemberitaan syariat baru mampu sebagai pemberi informasi saja dan belum bisa menjadi alat kontrol sosial, padahal media merupakan pemegang mandat pilar keempat demokrasi.

Media massa sebenarnya merupakan alat strategis untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap tindak kekerasan pada perempuan karena memiliki hegemoni untuk membangun opini publik. Namun, di sisi lain, media massa juga ternyata menjadi alat strategis untuk mengembangkan bahkan melestarikan tindak kekerasan pada perempuan. Berita tentang peristiwa kekerasan seksual, pemerkosaan, mesum, dan pembunuhan menjadi berita yang sangat menarik untuk dibahas. Terlebih dengan jika pelaku atau korban dalam berita tersebut perempuan dengan stigma yang tidak baik. Tidak hanya karena perempuan, pemberitaan tersebut akan menjadi menarik untuk diberitakan jika terjadi di daerah yang memiliki keunikan tersendiri, misalnya peraturan daerah yang tidak sama dengan daerah lain. Aceh menjadi sorotan dengan berbagai Qanun yang ada, yang dapat berimbas menjadi pemberitaan yang menarik di media massa, tidak hanya media lokal di Aceh tetapi media Nasional dan juga media Internasional.

Contoh berita yang menyudutkan perempuan adalah “*Gadis Dipergoki Mesum, Mengaku Diperkosa*”. Berita ini dimuat di media online lokal www.aceh.tribunnews.com tanggal 12 Desember 2011. Tidak hanya itu saja dan di media itu saja. Masih banyak lagi media lainnya. Baru-baru ini juga ada berita yang sangat memilukan dan sangat bias gender. Berita tentang seorang janda yang

diperkosa oleh delapan pria, karena sang janda mesum dengan laki-laki lain. Yang menjadi sorotan dari berita ini hanya dari sisi perempuan, jarang media mengangkat dari sisi laki-laki. Berita ini tidak hanya dimuat di media local tetapi nasional. Padahal dalam Qanun Syariat Islam, Undang-undang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik sangat seimbang antara perempuan dan laki-laki. Bahkan ada berita yang dimuat di salah satu media di Aceh yang menyebabkan seorang gadis bunuh diri karena dari judul dan isi berita sangat menyudutkan perempuan tersebut. Dia dituduh sebagai pelacur padahal dia adalah korban perkosaan. Pemberitaan yang berakibat fatal.

Perempuan seringkali menjadi korban yang paling dirugikan karena aturan yang mengatur moralitas masyarakat. Dan media pun juga ikut mendukung terjadinya eksploitasi perempuan dalam pemberitaan. Tidak jarang kita melihat pemberitaan lebih menjatuhkan atau menyudutkan perempuan. Berita tentang perempuan selalu diembel-embelkan dengan stereotip-stereotip yang kurang baik.

1.2. Perumusan Masalah

Pemberitaan yang menyudutkan perempuan Aceh tidak hanya terjadi di media lokal Aceh saja tetapi media nasional juga seringkali memuat berita yang melecehkan perempuan. Saat ini media lokal di Aceh sudah mengurangi pemberitaan yang berkaitan dengan pelanggaran Syariat yang dilakukan masyarakat di sana karena adanya Qanun baru yang melarang hal tersebut. Terlebih media lokal banyak memuat tentang keberpihakan media terhadap peraturan daerah dan perempuan menjadi korban. Namun media nasional tidak melakukannya karena tidak ada peraturan

seperti di Aceh, tidak memiliki keberpihakan kepada pihak apapun termasuk peraturan daerah atau lainnya.

Jika dilihat dari segi peraturan daerah dan kode etik jurnalistik, penulisan berita saat ini masih mengangkat pemberitaan dari segi perempuan agar menarik. Di Aceh pemberitaan tentang pelanggaran syariat sering diberitakan dari segi perempuan dan merendahkan perempuan. Padahal media di sana mengerti bagaimana proses dan pemberlakuan Qanun. Dan media nasional pun melakukan hal yang sama, terlebih dengan ketidaktahuannya terhadap apa itu Qanun dan baik buruknya Qanun. Namun tetap memberitakan hal-hal yang membuat anggapan tidak baik tentang Aceh yang menyebabkan anggapan bahwa Aceh tidak baik. Karena media massa di tangan pemilik laki-laki dan produsen, mereka akan beroperasi untuk kepentingan masyarakat patriarki. Di mana penyudutan terhadap perempuan dianggap biasa, pembisuan terhadap perempuan harus dilakukan agar mereka menjadi perempuan yang sesuai dengan yang telah diwacanakan oleh laki-laki.

Qanun Syariah Islam tidak hanya mengatur tentang perempuan tetapi semua masyarakat Aceh. Terlalu berlebihannya pemberitaan tentang Aceh dan segala kasusnya membuat masyarakat sering memiliki pikiran negatif tentang Aceh. Berita bias gender juga marak terjadi. Padahal dalam kode etik jurnalistik tidak ada pasal yang menyudutkan satu pihak. Di mana berita harus berimbang. Pemberitaan media memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Melihat latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana *Merdeka.com* memberitakan kekerasan seksual terhadap perempuan Aceh?
2. Bagaimana ideologi *Merdeka.com* dalam memberitakan kekerasan seksual terhadap perempuan Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana *Merdeka.com* memberitakan kekerasan terhadap perempuan Aceh.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana ideologi *Merdeka.com* dalam memberitakan kekerasan terhadap perempuan Aceh.

1.4. Signifikansi Penelitian

1.4.1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Komunikasi, khususnya Jurnalistik dan Media Massa. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai masukan tentang pengembangan kajian feminisme dalam praktik jurnalistik di instansi media massa. Serta dapat memberikan kontribusi baik dari segi penggunaan teori *muted group* dengan teori feminisme radikal kultural dan metode penelitian yang menggunakan *Critical Discourse Analysis* Norman Fairclough untuk menganalisa tentang kekerasan terhadap perempuan, khususnya di daerah Aceh.

1.4.2. Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi media massa dan para jurnalis dalam menuliskan pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan secara umum baik verbal maupun nonverbal khususnya pemberitaan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan Aceh. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi insan media massa agar lebih peka terhadap isu gender dan pemberitaan yang bermuatan kekerasan simbolik terhadap perempuan.

1.4.3. Signifikansi Sosial

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi perempuan dalam melihat bentuk kekerasan yang terjadi baik simbolik maupun kekerasan fisik. Dan dapat menjadi rekomendasi diskusi terhadap kekerasan yang marak terjadi atas perempuan.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Paradigma Penelitian

Dalam pandangan Guba dan Lincoln, paradigma didefinisikan sebagai “....*a set of basic beliefs (or metaphysics) that deals with ultimates or first principles...a world view that defines, for its holder, the nature of the 'world'....*” (Denzin dan Lincoln, 1994 : 107). Paradigma berhubungan erat dengan penelitian yang menekankan posisi peneliti dalam membentuk kerangka teori dan metodologi yang dipergunakan untuk mengetahui apa yang menjadi *quality criteria* bagi penelitian yang dilakukannya.

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis. Asumsi paradigma ini adalah untuk melihat Ilmu Sosial sebagai proses yang secara kritis bermaksud mengungkapkan struktur riil dibalik ilusi, kesadaran semu dari dunia materi yang bertujuan membentuk kesadaran sosial untuk mengubah dan memperbaiki kondisi kehidupan manusia atas dasar kesadaran subyektif. Serta berupaya mengubah kondisi sosial yang ada yang telah mendominasi realitas sosial pikiran masyarakat.

Dan filosofi paradigma ini secara ontologi yaitu historis realisme sebenarnya yang dibentuk oleh nilai-nilai sosial, politik, kultural, ekonomi, etnik dan gender terkristalisasi sepanjang waktu. Ada nilai-nilai sosial baru yang tercipta dengan adanya Syariat Islam di Aceh. Dimana media seharusnya mensosialisasikan dengan benar nilai-nilai yang ditanamkan dari Syariat yang berimbang dan tidak memihak pihak manapun. Dan media memuat kekerasan terhadap perempuan di Aceh dipengaruhi oleh Syariat Islam yang diterapkan. Epitimologis berupa transaksional/subjektivist temuan-temuan diantarai oleh nilai. Realita yang ditunjukkan media lebih banyak menyalahkan perempuan yang tidak mau mengikuti aturan Syariat yang berlaku. Dan metodologis, dialektik. Proses pemahaman ilmu merupakan hasil dari dialog/argumentatif beragam faktor yang melingkupi realitas sosial. Tidak mungkin memahami realitas yang tampak hanya berdasarkan kasat mata, karena hal itu bukanlah hal yang sesungguhnya, oleh karenanya harus menemukan realitas dibalik. Di mana media memuat berita tentang kekerasan dari segi perempuan karena dianggap akan menarik perhatian masyarakat. Jika berita

tersebut tentang Aceh maka akan dikaitkan Syariat Islam yang terkadang tidak ada kaitannya.

Dalam penelitian ini ontologinya adalah melihat realitas bagaimana kekerasan seksual terhadap perempuan dimuat di media massa. Penelitian ini lebih spesifik menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan strukturalis, dari pemikir berpengaruh seperti Karl Marx, Louis Althusser, Antonio Gramsci, Ferdinand Saussure, Ernest Laclau, Chantal Mouffe, dan Jacques Lacan. Secara khusus, Teori kritis memiliki dampak besar pada feminisme gelombang kedua. Dengan menyatu dengan feminisme radikal dalam teori *muted group*. Feminis Prancis Julia Kristeva (1974/1981), yang menyatakan "perempuan tidak pernah dapat didefinisikan". Marx dan Gramsci mengkritik masyarakat kapitalis dan cara itu menanamkan bahasa dan komunikasi dalam ideologi, Saussure terlibat dalam bahasa kritis memeriksa sebagai "tidak bersalah," sistem konvensional dan dengan demikian sewenang-wenang. Dan penelitian ini menggunakan teori *muted group* serta teori feminisme radikal untuk melihat pembungkaman dan kekerasan yang terjadi atas perempuan dalam media massa.

Paradigma kritis, menurut Hall, bukan hanya mengubah pandangan mengenai realitas yang dipandang alamiah, tetapi berargumentasi bahwa media adalah kunci utama dari pertarungan kekuasaan, melalui mana nilai-nilai kelompok dominan dimampatkan, dibuat berpengaruh, dan menentukan apa yang diinginkan oleh khalayak (Eriyanto, 2011: 29). Media menyajikan kekerasan dalam bentuk hal yang wajar, di

mana kalau yang menjadi korban atau tersangkanya perempuan akan menjadi sangat menarik dan dianggap wajar jika dimuat dalam berita.

1.5.2. *State of the Art*

1.5.2.1. Penelitian Sunarto: “Kekerasan Televisi Terhadap Perempuan”

Penelitian pada tahun 2007 ini berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Sunarto. Penelitian ini mengkaji tentang proses strukturasi media khususnya di media televisi, yaitu dengan melihat bentuk-bentuk kekerasan, dominasi gender, struktur gender dalam praktiknya institusi dan sosial media televisi, dan posisi kekerasan atas perempuan dalam proses strukturasi gender di media televisi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan metode *Critical Discourse Analysis* dan kajian feminis, yang didukung dengan analisis isi feminis dan etnografi feminis. Dan hasilnya adalah terdapat suatu proses naturalisasi kekerasan atas perempuan melalui program siaran televisi, yang terjadi dengan melibatkan struktur gender agensi perempuan dan struktur televisi beserta struktur sosial di belakangnya dalam resiprokal.

1.5.2.2. Penelitian Hapsari Dwiningtyas Sulistyani: “Korban dan Kuasa’ di dalam Kajian Kekerasan terhadap Perempuan”

Penelitian yang dilakukan Hapsari pada tahun 2011 ini mengenai seberapa besar studi gender tentang kekerasan terhadap perempuan terutama berkaitan dengan cara di mana perempuan korban dominasi kekuasaan patriarkal. Meskipun penelitian dan

studi tentang perempuan sebagai korban masih penting, perlu juga untuk mulai melihat potensi perempuan dalam memperoleh kekuasaan dan menantang posisi mereka sebagai korban. Penelitian ini menunjukkan kemungkinan pergeseran perspektif dominan pada studi perempuan. Menjelajahi tulisan perempuan adalah salah satu cara mencari titik alternatif pandangan yang mampu menantang dominasi patriarki pada pembangunan sosial perempuan.

1.5.2.3. Penelitian Ali Imron: “Konstruksi Media Terhadap Stereotipe Gender: Analisis Framing Terhadap Kasus Pemerkosaan Di Media Cetak”

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 oleh Ali Imron memuat tentang konstruksi media terhadap gender. Konstruksi media cetak yang cenderung mendramatisir dan melakukan *blow up* terhadap kasus-kasus pemerkosaan ternyata memojokkan korban sehingga menimbulkan bias gender. Tulisan ini menganalisis pemberitaan media cetak dalam kasus pemerkosaan dengan menggunakan analisis *framing*. Hasil analisis menunjukkan bahwa media cetak ternyata tidak hanya mengungkap kasus pemerkosaan saja namun seringkali memunculkan identitas korban dan foto-foto kejadian. Penggunaan visual *image* (foto korban) dapat dimaknai untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai fakta atau kebenaran menurut media. Hal ini menimbulkan batas-batas antara realitas yang bersifat faktual dan kenyataan yang bersifat watak fiksional menjadi kabur sehingga akan menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembaca.

1.5.2.4. Penelitian Hariyanto: “Gender dalam Konstruksi Media”

Dalam penelitian yang dilakukan Hariyanto pada tahun 2009 membahas tentang isu-isu gender, citra hubungan laki-laki dan perempuan dalam produk media, yang terletak di persetujuan posisi. Sedangkan produk media yang mewakili makna dan realitas tertentu yang akan disampaikan oleh penciptanya (pekerja media). Tidak jarang, rasa produk yang dibuat melalui media telah menempatkan posisi produk media sebagai bagian dari realitas sosial itu sendiri. Di sisi lain, posisi makna produk media ke media untuk legitimasi perubahan norma-norma dan nilai-nilai pemerintahan dalam masyarakat. Dengan kata lain, citra hubungan laki-laki dan perempuan dalam produk media yang mengandung pelecehan seksual dapat dilakukan masih menghargai konservatif lama dan berlaku untuk masyarakat bahwa Indonesia sangat patriarki.

Dan yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian di atas adalah penelitian ini memuat tentang kekerasan terhadap perempuan di Aceh yang terjadi di media nasional. Di mana Aceh juga memiliki peraturan daerah yang bisa memicu anggapan yang berbeda dengan daerah lainnya. Dan penelitian ini juga menggunakan kajian feminis radikal kultural serta teori *muted group* untuk melihat pembungkaman yang dilakukan oleh media terhadap perempuan.

1.5.3. *Muted Group Theory*

Muted Group Theory didasarkan karya antropolog Shirley Ardener (dalam Kramarae, 1981: 23-24), yang berpendapat bahwa status masyarakat tumpang tindih di mana

perempuan dan laki-laki berada dalam sistem patriarki dan masyarakat kapitalis. Dan perspektif perempuan dibatasi dengan kaca mata kuda dan suaranya tidak diartikulasi secara public. Mematikan berbeda dengan mendiamkan, mematikan berhasil ketika kelompok subordinat (perempuan) berhenti untuk menemukan dan mengembangkan gaya komunikasi untuk mengekspresikan diri. Teori ini berasal dari Edward Sapir (1884-1939) dan Benjamin Lee Whorf (1897-1941) dengan hipotesis bahasa ibu memiliki dampak penting pada bagaimana seseorang mempersepsi dunia. Hal ini kemudian melahirkan dua garis yang berbeda: (a) pandangan deterministik menyatakan bahwa struktur bahasa tertentu (misalnya, tata bahasa dan semantik) menentukan penutur cara bahasa itu melihat dunia/realitas; dan (b) sebaliknya, pandangan relativistik tidak kira bahasa untuk menentukan persepsi kita, tetapi untuk mempengaruhi kita ke arah pandangan tertentu dari realitas.

Menurut teori ini, perempuan menghadapi dilema yang timbul dari kenyataan bahwa pengalaman dan sarana komunikasi mereka dibatasi oleh marjinalisasi mereka dalam masyarakat dan isolasi relatif mereka dalam ranah privat, dianggap tidak hanya relevan dengan wacana publik, tetapi juga kurang afektif dari tenaga kerja dibayar dan akibatnya kurang berharga. Otto Jespersen (dalam Krollokke, 2006: 30-32), dalam bukunya *Language: Its Nature, Development, and Origin*, mengatakan bahwa perempuan secara linguistik lebih cepat daripada laki-laki. Keterampilan menjawab perempuan lebih unggul karena inferioritas intelektual mereka. Namun ucapan laki-laki dianggap memberikan bukti ilmiah dan tidak meragukan lagi sehingga

menimbulkan kritik keras dari kaum feminis. Budaya membedakan cara berbicara perempuan dan laki-laki. Perempuan harus berbicara dengan feminine agar diterima lingkungannya. Lakoff (dalam Kramarae, 1981: 30) ber teori bahwa perempuan ditugaskan dalam hubungan seperti ibu atau istri, sedangkan laki-laki berperan profesional. Perempuan didefinisikan karena hubungannya dengan laki-laki, dan laki-laki didefinisikan karena apa yang mereka kerjakan (Krolokke, 2009: 69).

Lakoff menelusuri konsep “*marking*” dari Ferdinand de Saussure. Gender merupakan kategori, subjek dari menandai. Dengan demikian, feminisme dan perempuan ditandai, membiarkan laki-laki dan maskulin tanpa tanda. Dalam *Man Made Language* (1985), Spender berpendapat bahwa laki-laki yang terlihat superior, dan karena laki-laki memegang kekuasaan sosial yang lebih, kekelakian dan atau maskulin lahir dari norma. Dalam bahasa laki-laki, sesuatu yang perempuan disepelkan atau digunakan seperti menghina orang lain. Para feminis komunikasi berpendapat ini konsekuensi yang berat karena bahasa buatan laki-laki membisukan perempuan. Para feminis percaya bahwa bahasa penting untuk menciptakan realitas gender, sedangkan golongan radikal lebih mengambil sikap deterministik. Bagi mereka, klasifikasi linguistik tidak pernah memihak, tapi menandai perempuan sebagai obyek seks dan milik laki-laki.

Perempuan adalah kaum yang terbungkam (*muted group*) pertama kali diutarakan oleh Edwin Ardener, antropolog sosial. Selanjutnya Ardener mengungkapkan, asumsi dasar *muted group theory* berkaitan dengan, (1) perempuan

mempersiapkan dunia secara berbeda dari laki-laki karena perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman dan aktivitas berbeda; (2) karena dominasi politis laki-laki, sistem persepsi laki-laki juga dominan, menghalangi kebebasan ekspresi perempuan; (3) agar bisa berpartisipasi dalam lingkungan sosial, perempuan harus mengubah model ekspresi komunikasi mereka agar bisa diterima oleh sistem ekspresi laki-laki (dalam Kramarae, 1981: 1-3).

Persepsi perempuan akan suatu pengalaman berbeda dari laki-laki karenanya mereka disubordinasikan. Akan tetapi, kata-kata dan norma-norma untuk berbicara tidak diciptakan dari atau sesuai dengan pengalaman perempuan, karenanya perempuan ‘terbungkam’ (Kramarae, 1981: 1). Menurut Kramarae, kata-kata perempuan tidak dihargai dalam masyarakat. Pemikiran perempuan mengalami hal yang sama. Ketika perempuan mencoba meniadakan ketidakadilan ini, kontrol pria terhadap komunikasi menempatkan perempuan dalam ketidakberdayaan. *Man-made language* membantu mendefinisikan, menjatuhkan, dan meniadakan perempuan. Perempuan adalah *the muted group*. Tipe dominansi pria pada bahasa hanyalah satu aspek saja dari berbagai cara untuk membungkam kepentingan perempuan dalam masyarakat.

Di media massa perempuan ditonjolkan sebagai makhluk yang lemah dan wajar mengalami kekerasan terlebih jika ada peraturan tertentu yang dilanggar atau tidak sepenuhnya dilakukan seperti yang sudah ditetapkan. Syariat Islam yang ada dibuat untuk mengatur masyarakat Aceh yang Muslim agar bertindak sesuai dengan aturan agama Islam. Tetapi ada saja masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Saat

aturan tersebut dilanggar terlebih dalam kasus kekerasan, maka media akan memuatnya dengan bahasa netral. Pada kenyataannya kenetralan tersebut tetap tidak sadar akan gender sehingga terjadi pembungkaman terhadap perempuan.

1.5.4. Feminis Radikal

Feminisme lahir di era Pencerahan (*enlightment*) di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg, sebuah kota di selatan Belanda pada tahun 1785. Menjelang abad 19 feminisme lahir menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari para perempuan kulit putih di Eropa. Perempuan di negara-negara penjajah Eropa memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai *universal sisterhood*.

Davies (dalam Van Zoonen, 2012: 28), mengatakan dalam media feminis radikal menganalisis kekuatan media untuk mempengaruhi perilaku laki-laki terhadap persepsi perempuan dan perempuan dari diri mereka berada di luar diskusi: “Para peneliti mungkin telah mampu membuktikan hubungan langsung antara keadaan apa pun media dan tindakan tertentu, tetapi ada bisa akan tidak ragu bahwa distorsi media yang memberikan kontribusi untuk iklim umum diskriminasi dan pelecehan perempuan”. Perempuan dirugikan dalam segala bidang dan dinomorduakan oleh laki-laki dalam masyarakat yang patriarki.

Feminisme muncul sebagai gerakan perlawanan terhadap masyarakat yang patriarki. Bhasin menjelaskan bahwa patriarki berarti kekuasaan bapak atau *patriarch*. Istilah ini secara umum digunakan untuk menyebut kekuasaan laki-laki; hubungan kuasa dengan apa laki-laki menguasai perempuan, dan untuk menyebut sistem yang menguasai perempuan tetap dikuasai melalui berbagai macam cara. Patriarki membentuk laki-laki sebagai superordinat dalam kerangka hubungan dengan perempuan yang dijadikan sebagai subordinatnya.

Patriarki menurut Bhasin merupakan sebuah sistem dominasi dan superioritas laki-laki, sistem kontrol terhadap perempuan, dalam mana perempuan dikuasai. Dalam patriarki melekat ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, bahwa perempuan harus dikontrol oleh laki-laki dan bahwa perempuan adalah bagian dari milik laki-laki. Dengan demikian terciptalah konstruksi sosial yang tersusun sebagai kontrol atas perempuan dan laki-laki berkuasa penuh mengendalikan hal tersebut. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada. Dan gerakan ini adalah sesuai namanya yang "radikal". Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan obyek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik.

Analisa feminis radikal terhadap kekerasan laki-laki fokus pada karakter gender maupun sosialnya. Mereka menelisik kekuatan-kekuatan sosial yang membentuk kekerasan ini dan implikasinya pada penindasan perempuan. Beberapa feminis radikal seperti Brownmiller (1976) berpendapat bahwa kekerasan laki-laki merupakan basis kontrol laki-laki atas perempuan (Sylvia Walby, 2014: 202). Feminis radikal melihat tegas hubungan atau relasi kekuasaan laki-laki dan perempuan. *“Personal is Political”* menjadi kata kunci bagi feminisme radikal. Feminisme radikal melihat sumber masalahnya adalah ideologi patriarki.

Feminisme radikal percaya pada pentingnya otonomi dan gerakan perempuan. Dia melihat persoalan personalitas perempuan tidak boleh dipisahkan dengan persoalan publik. Apapun yang menyangkut perempuan adalah politik, misalnya menilai perkawinan atau tidak mau menggunakan alat kontrasepsi. Politik bagi mereka bukan hanya sekedar jadi anggota legislatif atau partai. Feminisme radikal juga menolak dipisahkan publik otoritas sosial ekonomi perempuan, dan tawaran solusi *fire stone* adalah perempuan harus merebut pengendalian atas alat-alat teknologi reproduksi.

Menurut Rosemarie Putnam Tong (2009) dalam bukunya *Feminist Thought*, feminis libertarian-kultural membantu menjelaskan mengapa feminis radikal berpendapat seks “berbahaya” dan sebagainya menganggapnya: penuh kenikmatan”. Menurut Gayle Rubin, feminis radikal libertarian mendefinisikan sistem seks/gender adalah suatu rangkaian pengaturan, yang digunakan oleh masyarakat untuk

mentransformasikan seksualitas biologis menjadi produk kegiatan manusia. Feminis radikal libertarian menolak asumsi ada atau seharusnya ada, hubungan yang pasti antara jenis kelamin seseorang (laki-laki atau perempuan) dengan gender seseorang (maskulin atau feminine). Gender terpisah dari jenis kelamin, dan masyarakat patriarki menggunakan peran gender yang kaku, untuk memastikan perempuan pasif dan laki-laki aktif.

Menurut Kate Millett (dalam Rosemary Putnam Tong, 2009: 98-99), ideologi patriarki membesar-besarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, dan memastikan bahwa laki-laki selalu mempunyai peran yang maskulin dan dominan, sedangkan perempuan feminine dan subordinat. Androgini menurut Millett, hanya menjadi ideal jika kualitas feminine dan maskulin yang diintegrasikan ke dalam manusia androgini adalah masing-masing berharga. Shulamith Firestone mengklaim bahwa dasar material ideologi seksual/politik dari submit perempuan dan dominasi laki-laki berakar pada peran reproduksi laki-laki dan perempuan. Dan bagi Firestone tidak mungkin seseorang menjadi androgini.

Sedangkan feminis radikal kultural, menurut Marilyn French (dalam Rosemary Putnam Tong, 2009: 110-111) opresi laki-laki terhadap perempuan secara logika mengarahkan kepada sistem lain bentuk dominasi manusia. Daly menolak model androgini pluralis, yang di dalam konsepnya memandang bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai sifat-sifat yang berbeda, tetapi seharusnya setara dan saling melengkapi dan model androgini asimilasi, yang memandang bahwa perempuan dan

laki-laki harus menggabungkan baik sifat maskulin maupun feminine ke dalam diri mereka, untuk mencapai kemanusiaan yang penuh.

Dalam penelitian ini menggunakan teori feminis radikal kultural, di mana gerakan feminis ini mementang hal-hal yang berbau isme-isme yang ada. Kasus kekerasan ada politik tertentu terhadap perempuan juga dapat dilihat, seperti banyaknya kekerasan yang terjadi karena anggapan bahwa perempuan lemah dan laki-laki berkuasa. Dalam pemberitaan media pun terjadi hal yang sama. Pemberitaan tentang perempuan menjadi bahasan yang sangat menarik terlebih jika menunjukkan sisi kelemahannya. Dalam pemuatan berita terkadang banyak menggunakan sisi patriarki dalam penggunaan bahasa, seperti penggunaan kata “janda cantik” atau lainnya. Dan hal-hal seperti ini sangatlah ditentang oleh para pakar feminis radikal kultural karena adanya pemberdayaan terhadap perempuan dalam pemberitaan agar berita menarik. Perempuan sebagai obyek dari pemberitaan.

1.5.5. Kekerasan Seksual Pada Perempuan

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik terbuka maupun tertutup, menyerang, bertahan yang disertai penggunaan kekuatan terhadap orang lain. Menurut Haryatmoko yang mengutip Pascal Lardellier, kekerasan merupakan prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. Dalam Surnarto (2009, 55-56) menjelaskan kekerasan menurut Galtung adalah suatu kondisi yang akan terjadi bila manusia dipengaruhi oleh

sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Perspektif kekerasan demikian ini mengandung arti bahwa sesuatu kondisi negatif tertentu yang sebenarnya bisa dihilangkan dengan berbagai kemajuan sarana dan prasarana, serta ilmu dan teknologi yang sudah ada, akan tetapi karena alasan-alasan ideologis tertentu kondisi tersebut tetap dibiarkan saja tanpa ada usaha-usaha tertentu untuk mengatasinya.

Menurut Windhu, Luhulima dan Fry (dalam Sunarto, 2009: 56-57), kekerasan memiliki beberapa dimensi, antara lain: (1) bentuk kekerasan (fisik, psikologis, seksual, finansial, spiritual, dan fungsional); (2) efek kekerasan (negatif atau positif); (3) partisipan kekerasan (subjek dan obyek); (4) motif kekerasan; dan (5) sumber kekerasan (struktural ataukah personal).

Bentuk-bentuk kekerasan fisik yaitu berupa fisik tubuh manusia disakiti secara jasmani berupa siksaan, penganiayaan, hingga pembunuhan. Sedangkan secara psikologis dalam bentuk pengurangan kemampuan mental atau otak (rohani) karena perlakuan-perlakuan represif tertentu, misalnya ancaman, indoktrinasi, dan sebagainya. Jika dilihat dari efek, kekerasan berpengaruh secara positif atau negatif ini tampak dalam mekanisme *reward-punishment*. Dalam sistem imbalan dan hukuman ini terdapat pengendalian secara manipulatif dari si pemberi imbalan terhadap kebebasan di penerima.

Kekerasan melibatkan dua pihak, pelaku (subyek) dan korban (obyek). Partisipan kekerasan berkaitan dengan sumber kekerasan. Apabila subyek kekerasan dilakukan oleh seorang individu secara langsung ia disebut kekerasan personal, akan tetapi apabila pelakunya tidak tampak maka ia disebutkan sebagai kekerasan struktural. Pemukulan, penganiayaan, pembunuhan oleh satu orang terhadap orang lainnya merupakan tindak kekerasan personal. Sedang kekerasan struktural berbentuk eksploitasi, represi, ketidakadilan sosial, kemiskinan struktural, ketidakseimbangan ekologis, ancaman dan ketakutan.

Motif kekerasan berkaitan dengan intensi dari subyek kekerasan. Kekerasan yang disengaja atau tidak, apabila akibatnya membawa kondisi negatif pada obyek kekerasan, tetap merupakan suatu tindak kekerasan. Hal ini terutama untuk menjelaskan bagaimana kekerasan struktural beroperasi secara pervasif, perlahan-lahan, terjadi setiap hari, tanpa disadari oleh korban secara langsung.

Kekerasan mengandung unsur dominasi terhadap pihak lain, baik dalam bentuk fisik, verbal, moral, maupun psikologis (Haryatmoko, 2010: 127). Hal ini banyak terjadi pada perempuan, baik dari segi fisik maupun simbolik. Anggapan bahwa perempuan itu lemah yang banyak sekali menimbulkan tindakan kekerasan. Lembaga Rifka Annisa menjelaskan secara umum bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikologis, c) kekerasan seksual, dan d) kekerasan ekonomi (Lembaga Rifka Annisa, 2006: 10-11).

Kekerasan fisik, dapat berupa pemukulan, tamparan, jambakan, dibenturkan di tembok dan segala tindakan yang menyerang fisik atau yang mengakibatkan luka fisik perempuan. Kekerasan psikologis, merupakan umpatan, ejekan, cemoohan dan segala tindakan yang mengakibatkan tekanan psikologis termasuk ancaman dan pengekangan yang berakibat pada gangguan mental dan jiwa seperti trauma, hilangnya kepercayaan diri, dan berbagai akibat negatif lainnya. Bentuk kekerasan seksual dapat berupa pemerkosaan, pelecehan seksual, hingga pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) maupun *incest* (hubungan seksual antar anggota keluarga). Sedangkan kekerasan ekonomi berupa tidak diberikannya nafkah bagi perempuan yang berstatus ibu rumah tangga untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dilarang bekerja, dipaksa untuk bekerja, dieksploitasi secara ekonomi.

Berita kekerasan terhadap perempuan sering kita temukan di berbagai media massa. Apa lagi kasus kekerasan terhadap perempuan yang tampaknya tidak akan pernah berakhir. Perempuan sering kali mendapat diskriminasi dan pelecehan dalam media. Bicara soal kekerasan terhadap perempuan, lebih mengarah pada perjuangan kaum feminis yang menentang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menuntut adanya kesetaraan. Temuan yang umum dan analisis serta potret kaum perempuan dalam media massa adalah kecenderungan untuk menampilkan sosok perempuan dalam bentuk stereotip tertentu. Perilaku dikatakan sebagai tindakan kekerasan apabila ada serangan terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang. *Image* perempuan dalam pemberitaan lebih banyak menempatkan perempuan sebagai

'obyek penderita'. Karena seolah-olah perempuan digambarkan sebagai pihak yang teraniaya, korban kekerasan, dan korban pelecehan. Persoalan-persoalan seperti ini tidak hanya berdampak negatif bagi perempuan yang menjadi korban, tetapi juga kaum perempuan secara luas.

Kekerasan di media massa dapat disebut sebagai kekerasan yang dibenarkan (Mochamad Riyanto Rasyid, 2013: 74), karena telah menjadi sesuatu yang biasa, hal yang diizinkan dan dijadikan komodifikasi. Dalam penelitian ini kekerasan yang dibahas adalah segala kekerasan terhadap perempuan yang ada di media massa terlebih pada *Merdeka.com*. Perempuan dijadikan obyek dari pemberitaan dan dikemas semenarik mungkin agar menjadi suatu berita tersebut dapat dijual. Berita tentang perempuan di Aceh juga merupakan hal yang sangat menarik diberitakan, apalagi jika itu berkaitan dengan pelanggaran yang baik sengaja atau tidak sengaja dilakukan. Mau itu berita tentang pelanggaran Syariat Islam maupun perkosaan yang dialami perempuan Aceh.

1.5.6. Qanun Syariat Islam di Aceh

Syariat adalah susunan dari kalangan ahli fiqih awal berdasarkan interpretasi sumber asasinya, yaitu Alquran dan Sunnah. Syariat adalah cara yang dilalui oleh orang beriman untuk mencapai tujuan dalam urusan keseharian manusia di dunia. Syariat adalah sarana. Dan syariat dapat dibedakan dengan adanya perbedaan tradisi, kebudayaan dan peradaban masyarakat. Karena sasaran yang ingin dicapai oleh

syariat adalah manusia yang hidup dan bergerak yang secara pasti selalu bergulat dengan berbagai masalah secara terus menerus.

Adanya perbedaan hukum antara satu negara islam dengan negara lainnya, bahkan syariat islam yang satu dengan yang lainnya menunjukkan bahwa ini tergantung pada keadaan sosial-politik politik dari pemerintah, dan menunjukkan bahwa kitab suci juga diinterpretasikan dari sudut pandang yang berbeda-beda pula.

Syariat Islam di Indonesia mendapatkan pengertian yang berbeda-beda di tiap daerah. Dan istilah ini sangat politis. Kata “syariat” adalah istilah yang diperebutkan oleh pelbagai pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Peraturan daerah berbasis syariat di Aceh diberlakukan karena daerah ini memiliki otonomi khusus dan membedakan Aceh dengan daerah lain. Dan yang melatarbelakangi perda ini karena adanya konflik yang berkepanjangan antara GAM dan pemerintah pusat. Peraturan daerah syariat menjadi solusi untuk meredam konflik yang ada. pemberlakuan dan pelaksanaan syariat Islam adalah kelanjutan dari status otonomi khusus Aceh yang tertuang dalam UU No 18 tahun 2001.

Ada tiga pandangan tentang penerapan Syariat Islam di Aceh. Pertama, syariat merupakan solusi politik untuk konflik Aceh dan Pemerintah Pusat. Kedua, implementasi syariat Islam diharapkan dapat menghilangkan “penyakit” sosial yang ada semenjak konflik dan juga hukum nasional di Indonesia jarang sekali membawa

keadilan bagi warga Aceh. Dan ketiga, penerapan syariat oleh masyarakat Aceh dilihat sebagai “*genuine religious*” yang didukung oleh mayoritas masyarakat.

Tidak hanya hukum syariat yang berbeda-beda di setiap daerah, tetapi juga hasil penerapannya juga akan berbeda di tiap daerah. Seperti di Brunei Darussalam yang juga menerapkan hal ini. Di Aceh juga akan berbeda hasilnya. Dalam penelitian dari Ania Safitri (2007) dalam *Perempuan dalam Penerapan Syariat Islam* menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penerapan Syariat Islam di Aceh bias gender dan perempuan tetap yang menjadi korban.

1.5.7. Ideologi Dominan

Ideologi berasal dari kata *idea* dan *logos* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai aturan atau hukum tentang ide. Pengertian ide dapat dirunut asalnya ke konsep *idea* dan “dunia *idea*” dari Plato, filsuf besar Yunani yang hidup pada abad ke-3 SM (Bagus Takwin, 2003: 8). Ideologi dipandang sebagai ilmu (dalam pengertian tertentu berarti juga aturan atau hukum) yang mengkaji bagaimana ide-ide terbentuk dalam benak manusia. Pengertian ideologi sebagai kebenaran sejati menjadi dasar ideologi dalam arti positif yang secara kasar dapat disimpulkan sebagai seperangkat nilai dan aturan atau hukum yang dipercaya dapat membantu manusia menjalani hidupnya. Pendekatan ini menekankan bahwa manusia tinggal menganut nilai dan mengikuti aturan-aturan itu agar dapat menjalani hidupnya dengan baik.

Dalam literatur studi perempuan menjelaskan partisipasi perempuan dalam mengisi lapangan kerja atau jenis pekerjaan tertentu merupakan indikator cerminan dari sistem nilai tradisional yang memandang buruk perempuan yang bekerja di luar rumah. Dan partisipasi perempuan yang semakin aktif diinterpretasikan sebagai cerminan telah berubahnya sistem nilai tradisional. Dalam beberapa contoh kasus yang menggambarkan tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat, beserta pandangan-pandangan tersebut yang memberi batasan-batasan mengenai apa yang bisa dan seharusnya dilakukan perempuan dan apa yang tidak? Tidak hanya itu saja, sistem atau peraturan yang dibuat lebih banyak atau lebih diterapkan pada perempuan dengan alasan untuk menjaga tradisi.

Bisa dikatakan bahwa sistem ide atau nilai yang mendasari pembagian kerja seksual mempunyai bentuk-bentuk yang kerap berbeda. Ditingkat interaksi yang berbeda (ditingkat yang sangat umum dan tingkat individu), dalam arena sosial yang berbeda (di rumah, di tempat kerja, atau di pertemuan sosial), serta dalam satu masyarakat lainnya. Ideologi dominan bahwa berbagai pranata/ institusi berfungsi membentuk, mengarahkan, dan melestarikan ideologi dominan tertentu meskipun pada waktu bersamaan bisa pula terdapat berbagai ideologi lain yang berlaku sekaligus yang mungkin berlawanan dengan dan bahkan kadang-kadang merupakan tandingan terhadap ideologi dominan tersebut.

Menurut Louis Althusser, ideologi adalah aktivitas yang tepat dilakukan orang di dunia nyata. Sebagaimana dari aktivitas itu merupakan imajinasi manusia yang

memberikan makna sosial. Dengan kata lain, ideologi dan subjek saling menentukan. Bagi Althusser ideologi bukan seperangkat ide atau keyakinan, tapi tindakan-tindakan yang disisipkan ke dalam praktik material. Praktik ini diatur oleh ritual, ke dalam eksistensi material dari suatu aparatus ideologi.

1.5.7.1. Ideologi gender sebagai ideologi dominan

Ahli antropologi, Alice Schlegel, menggunakan istilah *gender meaning* (pengertian gender) yang mempunyai arti yang serupa dengan ideologi gender. Ideologi gender sebagai ideologi yang dominan dapat kita maksudkan sebagai bagian dari proses dialektis antar sistem-sistem yang berada pada masyarakat satu dengan yang lainnya. Ini artinya sesuatu ideologi yang disebut sebagai bagian dari alat atau mekanisme yang dominan dapat masuk dalam segala aspek masyarakat. Pandangan ini beranggapan bahwa sebetulnya jarang ada aturan yang secara murni merupakan konsensus bersama. Kepentingan-kepentingan yang berbeda yang dimiliki oleh masing-masing kelompok tidak begitu saja dapat disesuaikan. Karena itu, kelompok yang kuat dalam hal ini memegang peranan yang penting. Kelompok inilah yang mempunyai dan memiliki sarana atau sumber daya tertentu yang tidak dimiliki oleh kelompok lainnya.

Ideologi ini yang terwujud dalam bentuk nilai-nilai dan aturan-aturan yang sengaja dibentuk agar mengurangi kontradiksi antara sistem yang bersesuaian dalam kesinambungan sistem yang ada. Dalam pemberitaan ada ideologi dominan yang digunakan dalam membingkai sebuah kasus. Ideologi yang digunakan terkadang

lebih menggunakan ideologi yang berkuasa, di mana terkadang banyak yang dirugikan dalam hal tersebut terlebih perempuan. Dalam berita kekerasan terhadap perempuan terlebih perempuan di Aceh memiliki ideologi dominan yang menyertai di dalamnya. Ideologi yang dipengaruhi baik itu dari kepentingan redaksi maupun dari relasi perusahaan itu sendiri terhadap kasus yang dimuat dalam pemberitaan.

Namun ideologi dari kelompok dominan hanya efektif jika didasarkan pada kenyataan bahwa anggota kelompok termasuk yang didominasi menganggap hal tersebut sebagai kebenaran dan kewajaran. Menurut van Dijk, fenomena apa yang disebut sebagai kesadaran palsu, bagaimana kelompok dominan memanipulasi ideologi kepada kelompok yang tidak dominan melalui kampanye diinformasi (seperti agama tertentu yang menyebabkan suatu kerusuhan, orang kulit hitam selalu bertindak kriminal), melalui kontrol media, dan sebagainya (Eriyanto, 2011: 13).

Dalam hal ini media memegang peranan yang penting dalam mengarahkan dan mengendalikan bentuk perdebatan atau wacana yang muncul. Media dapat menyampaikan kepentingan tertentu baik pertentangan atau penerimaan terhadap peraturan seperti Syariat Islam di kalangan masyarakat dan dunia.

1.5.8. Kebijakan Media

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan/kepemimpinan dan cara bertindak (Balai Pustaka, 2007). Menurut Ealau dan Pewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau

yang melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam komunikasi massa sehari-hari masyarakat menggunakan media. Media merupakan tempat menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima yang dapat merangsang pikiran, perasaan, minat seseorang dan perhatian.

Media harusnya bersifat terbuka dan memuat informasi yang benar sesuai dengan fakta. Media harusnya melakukan tugasnya sesuai dengan fungsinya, untuk itu diperlukan suatu kebijakan untuk memperlihatkan bentuk perhatian dari pemerintah dan juga masyarakat tentang bagaimana membentuk dan mengatur aktivitas sosial, politik, budaya, dan ekonomi, termasuk aktivitas media agar dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Sebagai kebijakan komunikasi, kebijakan media massa merupakan kebijakan publik (Abrar, 2008: 13).

Tujuan kebijakan media massa, paling tidak bisa dilihat dari dua segi, sosiologi dan komunikasi. Dari sisi sosiologi, tujuan kebijakan komunikasi adalah untuk menempatkan proses komunikasi sebagai salah satu bagian dari dinamika sosial yang tidak merugikan masyarakat (Abrar, 2008: 16). Dengan demikian, masyarakat bisa mengendalikan proses komunikasi yang terjadi di antara mereka. Tegasnya, dari sudut sosiologi, kebijakan komunikasi memberdayakan masyarakat dalam melakukan proses komunikasi. Sementara dari sisi komunikasi, kebijakan komunikasi bertujuan untuk melancarkan sistem komunikasi. Pemberdayaan masyarakat dalam komunikasi agar masyarakat sadar akan apa yang sedang dialami atau dihadapi. Banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa apa yang dilakukan telah melanggar aturan atau kebijakan yang ada. Tidak hanya masyarakat, terkadang

wartawan pun melakukan hal yang sama. Dengan menggunakan keterampilannya atau wewenangnya dalam menulis berita yang tanpa disadari telah melakukan pelanggaran.

Selain itu, kebijakan media massa Indonesia merupakan kumpulan prinsip dan norma yang mengatur sistem media massa Indonesia. Sebagai kumpulan prinsip dan norma yang mengatur sistem media massa, kebijakan media massa tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sosial, politik dan ekonomi sebuah negara. Sedangkan makna dari kebijakan komunikasi, adalah pedoman untuk melancarkan sistem komunikasi. Konteks kebijakan media massa adalah keterkaitan kebijakan tersebut dengan sesuatu yang melingkupi dirinya, misalnya ekonomi politik, politik komunikasi dan sebagainya. Konteks ini begitu penting sehingga ia bisa menentukan domain kebijakan media massa. Sebagai pedoman, kebijakan media massa merupakan kumpulan prinsip-prinsip dan norma-norma yang sengaja diciptakan untuk mengatur perilaku sistem komunikasi (Abrar, 2008: 3).

Media massa saat ini merupakan media dalam menyampaikan informasi perubahan kepada masyarakat sehingga bisa dikatakan sebagai alat konstruksi sosial yang paling ampuh. Dalam membentuk sebuah media biasanya pemilik memiliki andil dalam membentuk kebijakan medianya yang sesuai dengan kode etik dan undang-undang. Redaksi media tersebut juga memiliki kebijakan tersendiri dalam bentuk atau format dari pemberitaan. Segmentasi pemberitaan biasanya ditentukan oleh redaksi media tersebut. Pemuatan berita tentang kekerasan pun juga akan diseleksi terlebih dahulu di redaksi. Berita yang dimuat haruslah berita yang menarik

dan sensasional. Pemberitaan kekerasan biasanya akan lebih menarik jika yang menjadi korban atau pelaku adalah perempuan terlebih jika kasus tersebut terjadi di daerah yang jauh atau memiliki keunikan. Biasanya daerah unik dan perempuan akan menjadi obyek pemberitaan tersebut.

Kebijakan memperlihatkan bentuk perhatian dari pemerintah dan juga masyarakat tentang bagaimana membentuk dan mengatur aktivitas sosial, politik, budaya, dan ekonomi, termasuk aktivitas media agar dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Kebijakan dalam media massa mengatur atau membentuk media agar memberikan informasi yang benar tanpa ada yang dilebih-lebihkan atau berpihak bahkan menyakiti masyarakat atau perempuan. Terlebih untuk daerah yang rawan akan konflik.

1.5.9. Analisis Wacana

Menurut Hawthorn, wacana adalah komunikasi kebahasaan yang terlihat sebagai sebuah pertukaran di antara pembicara dan pendengar, sebagai sebuah aktivitas personal di mana bentuknya ditentukan oleh tujuan sosialnya (dalam Eriyanto, 2011: 2). Istilah analisis wacana adalah istilah yang dipakai dalam banyak disiplin ilmu dengan berbagai pengertian. Analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. Analisis wacana pada paradigma kritis menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Karena

menggunakan paradigma kritis maka analisis wacana ini dikenal dengan analisis wacana kritis.

Menurut Fairclough dan Wodak, *Critical Discourse Analysis* melihat wacana pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial. Praktik wacana bisa jadi menampilkan efek ideologi, dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidakimbang antara kelas sosial, laki-laki dan perempuan, kelompok mayoritas dan minoritas melalui mana perbedaan itu direpresentasikan dalam posisi sosial yang ditampilkan. *Critical Discourse Analysis* melihat bahasa sebagai faktor penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat (Eriyanto, 2011: 7). Berikut karakteristik penting dari *Critical Discourse Analysis* menurut Tuen A. Van Dijk, Fairclough, dan Wodak yaitu: a) tindakan, b) konteks, c) historis, d) kekuasaan, dan e) ideologi.

Tindakan. Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (*action*). Yang mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. Ada beberapa konsekuensi bagaimana wacana harus dipandang. Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, untuk mempengaruhi, memperdebatkan, membujuk, menyangga, bereaksi, dan sebagainya. Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang dieksploitasi secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.

Konteks. Menurut Guy Cook, analisis wacana juga melihat konteks komunikasi, siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa, dalam jenis khalayak dan situasi apa, bagaimana perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi, dan hubungan untuk setiap masing-masing pihak. Guy Cook menyebutkan tiga hal sentral dalam pengertian wacana yaitu, teks, konteks dan wacana. Teks adalah semua bentuk bahasa dan jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek suara, citra dan lainnya. Konteks adalah memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipasi dalam bahasa, situasi di mana teks diproduksi, fungsi yang dimaksudkan dan sebagainya. Dan wacana yang dimaknai sebagai teks dan konteks secara bersamaan. Konteks yang mempengaruhi wacana, pertama, partisipan wacana, latar belakang siapa yang memproduksi wacana. Kedua, setting sosial tertentu, seperti tempat, waktu, posisi pembicara dan pendengar atau lingkungan fisik.

Historis. Pemahaman mengenai wacana teks hanya akan diperoleh kalau kita bisa memberikan konteks historis di mana teks itu diciptakan. Bagaimana situasi sosial politik, suasana pada saat itu. Saat melakukan analisis perlu tinjauan untuk mengerti mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu dan seterusnya.

Kekuasaan. Setiap wacana yang muncul dalam teks, percakapan atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan

antara wacana dengan masyarakat. *Critical Discourse Analysis* tidak membatasi dirinya pada detail teks atau struktur wacana saja tetapi juga menghubungkan dengan kekuasaan dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya tertentu. Kekuasaan penting dalam melihat apa yang disebut sebagai kontrol. Kelompok dominan membuat kelompok lain bertindak dan berbicara sesuai dengan yang diinginkan. Bentuk kontrol dalam wacana bisa berupa kontrol atas konteks, atau struktur wacana.

Ideologi. Ideologi dibangun oleh kelompok dominan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasinya. Menurut van Dijk, terdapat fenomena kesadaran palsu, di mana kelompok dominan memanipulasi ideologi kepada kelompok yang tidak dominan melalui kampanye disinformasi (seperti agama tertentu yang menyebabkan suatu kerusuhan, orang kulit hitam selalu bertindak kriminal), melalui kontrol media dan sebagainya.

Dan penelitian ini menggunakan analisis Norman Fairclough yang berdasarkan pada, bagaimana menghubungkan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro. Fairclough ingin melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Berdasarkan pada linguistik dan pemikiran sosial dan politik, dan secara umum diintegrasikan pada perubahan sosial. Teks yang dibentuk untuk menggambarkan sosok perempuan Aceh dalam media massa juga dipengaruhi oleh praktik kekuasaan yang ada baik di media maupun kekuasaan politik sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan baik fisik maupun simbolik. Menurut Fairclough,

analisis harus dipisahkan pada bagian bahasa itu terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu (dalam Yoce Aliah Darma, 2013: 89).

1.5.10. Asumsi Penelitian

Pemberitaan di *Merdeka.com* tentang perempuan Aceh menunjukkan bahwa perempuan itu sebagai obyek atau korban tanpa bisa membela diri atau menyuarakan dirinya di media. Perempuan dibisukan oleh pemberitaan tersebut. Dan perempuan mengalami kekerasan yang bertubi-tubi. Baik itu kekerasan fisik dan juga kekerasan simbolik dari isi pemberitaan. *Muted Group Theory* dan aliran feminis radikal kultural menjadi jawaban dari adanya pembisuan terhadap perempuan. *Muted Group Theory* menjelaskan perempuan menjadi obyek yang dimarjinalkan demi kepentingan laki-laki tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di media massa. Feminis radikal kultural mengungkapkan pandangan bahwa adalah lebih baik menjadi perempuan atau feminin, daripada menjadi laki-laki atau maskulin. Karena itu, perempuan tidak seharusnya mencoba untuk menjadi seperti laki-laki. Sebaliknya, perempuan harusnya mencoba untuk menjadi lebih seperti perempuan, dan menekankan nilai-nilai dan sifat-sifat, yang secara kultural, dihubungkan terhadap perempuan (saling kebergantungan, berbagi, emosi, kepercayaan dan sebagainya) dan meninggalkan penekanan atas nilai-nilai dan sifat yang secara kultural dihubungkan terhadap laki-laki.

1.6. Operasional Konsep

1.6.1. Kekerasan di Media

Karen Boyle, memandang bahwa media massa dapat mempengaruhi perilaku konsumennya. David Trend, menggariskan bahwa tidak mutlak menjadikan orang berperilaku agresif dan melakukan tindakan kriminal, namun media *violence* dapat menjadi berbahaya. Media dapat memberikan identitas dan mengubah keyakinan dan sikap suatu masyarakat secara perlahan-lahan dan kontinyu. Permasalahannya, pesan yang dibawa media massa tidak saja bersifat positif namun juga bersifat negatif, bahkan kadang-kadang pesan positif dimodifikasi hingga menjadi negatif. Media massa merupakan alat strategis untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap tindak kekerasan pada perempuan karena memiliki hegemoni untuk membangun opini publik. Namun, di sisi lain, media massa juga ternyata menjadi alat strategis untuk mengembangkan bahkan melestarikan tindak kekerasan pada perempuan. Berkaitan dengan kemampuan media yang dapat menciptakan realitas sosial.

1.6.2. Perempuan Aceh

Aceh merupakan daerah yang banyak mengalami kejadian baik itu konflik ataupun bencana. Aceh menjadi sebuah daerah yang sangat menarik untuk dilihat dan menjadi sorotan dunia. Tidak hanya karena konflik atau bencana yang pernah terjadi di sana namun juga karena peraturan daerahnya. Perempuan di Aceh juga menjadi sorotan di media massa, baik itu karena prestasi maupun kekerasan yang terjadi. Ancaman

kekerasan sepertinya tidak bisa lepas dari perempuan Aceh. Dari data yang ada telah menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan Aceh sangat banyak terjadi baik fisik maupun simbolik dari pemberitaan. Perempuan Aceh tidak hanya mengalami kekerasan karena faktor konflik, tetapi juga kekerasan domestik.

1.6.3. Ideologi Media Massa

Media massa memiliki fungsi untuk memberikan informasi dan edukasi terhadap masyarakat. Dan ideologi media massa ditentukan oleh redaksi media tersebut. Ideologi memberikan kesadaran palsu secara terus menerus kepada masyarakat, dan masyarakat menganggap hal tersebut benar adanya. Seperti penggunaan sudut pandang laki-laki dalam pemberitaan terhadap perempuan. Di mana perempuan akan selalu menjadi obyek pemberitaan yang menarik dan menjadi bahan komodifikasi untuk menarik pembaca. Sehingga perempuan merasa haknya tidak dipenuhi namun harus tetap diam. Terkadang ideologi media membuat pembungkaman terhadap perempuan.

1.7. Metode penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis berupa analisis wacana kritis. Metode kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya (Rachmat Kriyantono, 2009: 56). Secara operasional, studi ini berusaha menggambarkan proses

Critical Discourse Analysis mengenai teks/bahasa pemberitaan kasus kekerasan terhadap perempuan Aceh di media massa, khususnya di media online "Merdeka.com".

1.7.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di harian online *Merdeka.com*. *Merdeka.com* dipilih sebagai obyek penelitian karena peneliti telah melakukan prapenelitian terhadap beberapa situs berita online yang ada dan menunjukkan bahwa dari Januari 2013 sampai Desember 2014 lebih banyak dimuat di situs *Merdeka.com*. Bahkan ada beberapa media yang seperti *Yahoo.com* dan beberapa media online lainnya pun ikut melansir berita tentang Aceh dari *Merdeka.com*. Dan juga peneliti ingin melihat bagaimana media massa di luar Aceh memberitakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Aceh, terutama pemberitaan tentang perempuan Aceh.

1.7.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti, bisa berupa orang atau apa saja yang menjadi sumber penelitian. Subjek penelitian ini adalah berita-berita kekerasan terhadap perempuan Aceh dari Januari 2013 sampai Desember 2014 di situs online *Merdeka.com*, redaktur pelaksana atau jurnalis yang menulis topik tersebut, dan juga pembaca berita tersebut yang memberikan komentar di situs berita tentang kekerasan terhadap perempuan Aceh di *Merdeka.com*.

1.7.4. Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari:

1.7.4.1. Data Primer

Data utama yang digunakan dalam *Critical Discourse Analysis* Norman Fairclough, yaitu dari teks berupa analisis framing dari berita tentang perempuan Aceh di *Merdeka.com*. Dari *discourse practice* berupa wawancara dengan redaktur atau wartawan *Merdeka.com*. Dan *sociocultural practice* dari ideologi atau peraturan daerah Aceh.

1.7.4.2. Data Sekunder

Data ini merupakan penunjang berupa tulisan atau gambar. Data ini merupakan literatur tentang kajian *Critical Discourse Analysis* dikaitkan dengan komunikasi massa, yang datanya diperoleh dari buku, jurnal penelitian, artikel, dan internet. Data sekunder bermanfaat untuk pengembangan kerangka berpikir dan pengkajian analisis masalah penelitian.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1.7.5.1. Teks (*Microlevel*)

Analisis *Microlevel*, menganalisis teks dengan cermat dan fokus supaya dapat memperoleh data yang dapat menggambarkan representasi teks. Dan juga secara detail aspek yang dikejar dalam tingkat analisis ini adalah garis besar atau isi teks, lokasi, sikap dan tindakan tokoh tersebut dan seterusnya. Menurut Halliday (dalam Yoce Aliah Darma, 2013: 189) menyatakan bahwa teks adalah suatu pilihan semantis data konteks sosial, yaitu suatu cara pengungkapan makna melalui bahasa lisan atau tulis. Dan teks dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari analisis framing berita kekerasan terhadap perempuan di Aceh yang dimuat pada situs online *Merdeka.com*. Analisis framing yang digunakan adalah model dari Robert N. Entman. Dalam konsepsi Entman, *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan (Eriyanto, 2012: 188).

1.7.5.2. Discourse Practice (*Mesolevel*)

Discourse Practice atau Analisis *Mesolevel*, terfokus pada dua aspek yaitu produksi teks dan konsumsi teks. Teks berita diproduksi dengan cara yang spesifik dengan rutinitas dan pola kerja yang terstruktur (Eriyanto, 2011: 278). Konsumsi teks bisa dihasilkan secara personal ketika seseorang mengkonsumsi teks atau secara kolektif (peraturan perundang-undangan dan lainnya). Dan data primer dari *discourse practice*

dalam proses produksi diperoleh dari hasil wawancara redaktur pelaksana atau wartawan *Merdeka.com*, sedangkan konsumsinya diperoleh dari hasil komentar para pembaca berita tentang kekerasan terhadap perempuan Aceh yang dimuat di situs online *Merdeka.com*.

1.7.5.3. Sociocultural Practice (Macrolevel)

Sociocultural Practice atau Analisis *Macrolevel* terfokus pada fenomena di mana teks dibuat. Banyak hal, seperti konteks situasi, lebih luas adalah konteks dari praktik institusi dari media sendiri dalam hubungannya dengan masyarakat atau budaya dan politik tertentu (Yoce Aliah Darma, 2013: 90). Dan data primer *sociocultural practice* dalam penelitian ini tidak berhubungan langsung dengan produksi teks, tetapi menentukan bagaimana teks diproduksi dan dipahami, yaitu kondisi Aceh yang diterapkan Qanun Syariat Islam di Aceh dan ideologi media tersebut.

1.7.6. Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan *Critical Discourse Analysis* Norman Fairclough dan Analisis Framing Robert N. Entman, khususnya dalam menganalisa teks. Menganalisis teks tentang perempuan Aceh yang dimuat di situs online *Merdeka.com*. Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dengan menggunakan instrumen analisis framing dengan model Entman melalui perangkat yaitu: *Define Problems* (Definisi Masalah), *Diagnose Causes* (Perkiraan Masalah Dari Sumber Masalah), *Make Moral*

Judgement (Pembuatan keputusan Moral), dan *Treatment Recommendation* (Penyelesaian Masalah).

Define Problems (Definisi Masalah). Dalam hal ini, masalah yang ada kemudian didefinisikan dan bagaimana suatu masalah/isu dilihat atau sebagai masalah apa yang ada. Masalah-masalah yang ada dilihat mulai dari pembentukan image yang dilakukan media, keterkaitan media dalam membuat berita-berita tentang perempuan di Aceh.

Diagnose Causes (Perkiraan Masalah Dari Sumber Masalah). Apa penyebab dari suatu masalah, siapa atau aktor yang dianggap sebagai penyebab mereka? Siapa atau apa yang banyak diberitakan? Dalam kasus ini lebih banyak berita dilakukan pada perempuan yang menjadi korban yang tidak bisa memberikan keterangan apapun.

Make Moral Judgement (Pembuatan keputusan Moral). Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan? Membuat keputusan moral di balik peritiswa yang telah terjadi, mengenai aspek-aspek yang dinilai berguna dalam pengambilan dan penayangan berita yang dilihat oleh peneliti.

Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah). Di sini diberikan penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap

perempuan Aceh oleh peneliti dilihat dari sektor-sektor vital seperti sektor ekonomi dan sektor sosial di masyarakat.

Menurut Norman Fairclough untuk memahami wacana (naskah atau teks) tidak dapat lepas dari konteksnya. Untuk menemukan "*realitas*" di balik teks perlu melakukan penelusuran atas konteks produksi teks, konsumsi teks, dan aspek sosial budaya yang mempengaruhi pembuatan teks.

Analisis praktik wacana memfokuskan pada aspek produksi dan konsumsi teks. Bagaimana proses pembuatan teks dan konsumsi teks seperti bagaimana penerima teks melakukan konsumsi dan interpretasi teks. Untuk melakukan analisis ini, perlu juga dilakukan analisis intertekstualitas. Analisis intertekstualitas ditekankan pada bagaimana wartawan menampilkan suaranya sendiri di antara suara dan pandangan dari banyak pihak dalam teks berita. Analisis intertekstualitas ini dapat membantu peneliti dalam melihat dan mengungkapkan praktik produksi dan konsumsi wacana yang dilakukan wartawan atau media melalui teks.

Proses produksi teks, ada tiga aspek penting. Pertama, dari sisi individu wartawannya itu sendiri. Kedua, dari sisi bagaimana hubungan antara reporter dengan struktur organisasi media, baik dengan sesama anggota redaksi (hubungan antara redaktur, redaktur pelaksana, reporter, dan sebagainya) maupun dengan bidang lain dalam satu media (periklanan, pemasaran, distribusi, dan sebagainya). Ketiga, praktik/rutinitas kerja dari produksi berita mulai dari pencarian berita, penulisan,

editing sampai muncul sebagai tulisan di media (dalam Yulianto, 2010: 114). Ketiga elemen tersebut merupakan keseluruhan dari praktik wacana suatu media yang saling terkait, dalam memproduksi suatu wacana berita. Untuk proses konsumsi teks akan berbeda pemaknaannya, tergantung pada konteks sosialnya.

Sedangkan dalam analisis *sociocultural practice*, peneliti akan mengkaitkan analisis teks dan praktik wacana dengan konteks sosial dan budaya yang ada. Bagaimana diskursus membentuk atau dibentuk oleh kondisi sosiokultural. Menurut Fairclough, praktik sosiokultural dapat diuraikan ke dalam tiga level analisis, antara lain sebagai berikut: Situasional, Institusional, dan sosial. Yang di sini dilakukan hal yang berkaitan dengan Qanun Syariat Islam yang diterapkan di Aceh. Berdasarkan hasil analisa yang ada, akan ditarik kesimpulan mengenai posisi perempuan, kebijakan media, dan ideologi apa yang digunakan situs online *Merdeka.com*.

1.7.7. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Guba dan Lincoln mengatakan *goodness* atau kriteria kualitas penelitian ini dapat dicermati dari paradigma atau perspektif yang digunakan peneliti. *Goodness* dalam studi ini didasarkan pada sejauh mana penelitian memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi dan politik (*historical situatedness*) (Denzin dan Lincoln, 2005: 195-196). Dalam penelitian ini *Critical Discourse Analysis* Norman Fairclough merupakan metode yang sesuai untuk mendeskripsikan makna dari pemberitaan kekerasan terhadap perempuan Aceh di situs *Merdeka.com*. Terlebih analisis

discourse practice dan *sociocultural practice*, yang dapat mengkritisi pengalaman (dalam konteks sejarah, sosial, budaya, ekonomi politik) dan juga pikiran para informan tentang proses produksi, konsumsi dan juga level sosial budaya yang dapat mempengaruhi proses pembentukan wacana pada teks-teks berita kekerasan tersebut.

1.7.8. Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, terbatasnya alokasi waktu peneliti untuk menyelesaikan laporan tesis dan situasi ini yang menjadi hambatan yang dirasakan peneliti. Kedua, analisa konsumsi tidak bisa dilakukan dengan cara wawancara mendalam terhadap para pembaca. Dan hanya bisa menganalisa dari komentar-komentar pada pembaca yang ada di situs *Merdeka.com*.